



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR **10** TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
30. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
32. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
37. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

#### Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp4.651.384.094.648,00 (empat triliun enam ratus lima puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah koma nol nol) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Daerah Rp4.157.446.819.351,00
  - b. Belanja Daerah Rp4.627.883.014.649,00
  - Defisit/Surplus Rp(470.436.195.298)
  - c. Pembiayaan Daerah
    1. Penerimaan Rp493.937.275.297,00
    2. Pengeluaran Rp23.501.080.000,00
    - Pembiayaan Rp470.436.195.297,00
    - Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp-

#### Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp4.157.446.819.351,00 (empat triliun seratus lima puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah koma nol nol), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp969.634.012.302,00 yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp493.013.669.290,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah koma nol nol).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.972.392.911,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah koma nol nol)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.441.288.786,00 (enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah koma nol nol)
- (5) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp386.206.661.315,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar dua ratus enam juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah koma nol nol).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.159.812.807.049,00 (tiga triliun seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah koma nol nol), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.639.308.213.000,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan juta dua ratus tiga belas ribu rupiah koma nol nol).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp520.504.594.049,00 (lima ratus dua puluh miliar lima ratus empat juta lima ratus sembilan empat ribu empat puluh sembilan rupiah koma nol nol).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan hibah;
  - b. dana Darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp- (-).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp-(-).

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp4.627.883.014.649,00 (empat triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah koma nol nol), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp3.453.425.102.255,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta seratus dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah koma nol nol), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.087.337.448.977,00 (dua triliun delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma nol nol).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.135.206.285.484,00 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar dua ratus enam juta dua ratus delapan lima ribu empat ratus delapan rupiah koma nol nol).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp- (-).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.483.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah koma nol nol).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp206.030.208.138,00 (dua ratus enam miliar tiga puluh juta dua ratus delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah koma nol nol).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.368.159.656,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah koma nol nol).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp480.053.680.303,00 (empat delapan puluh miliar lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah koma nol nol), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.313.404.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus empat ribu rupiah koma nol nol).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.919.404.971,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah koma nol nol).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.259.257.551,00 (seratus miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma nol nol).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp269.931.181.131,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah koma nol nol).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.519.480.750,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah koma nol nol).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp- (-).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp53.913.774.271,00 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah koma nol nol), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp640.490.457.820,00 (enam ratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah koma nol nol), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.298.606.220,00 (empat puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam ribu dua ratus dua puluh rupiah koma nol nol).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp598.191.851.600,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah koma nol nol).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp493.937.275.297,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma nol nol) , terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp493.937.275.297,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma nol nol), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp493.937.275.297,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma nol nol)
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp- (-).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp- (-).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp- (-).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp- (-).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp- (-).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp23.501.080.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus satu juta delapan puluh ribu rupiah koma nol nol), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp- (-).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.501.080.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus satu juta delapan puluh ribu rupiah koma nol nol).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp- (-).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp- (-).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp- (-).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp470.436.195.298,00) (empat ratus tujuh puluh miliar empat ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah koma nol nol).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp470.436.195.298,00 (empat ratus tujuh puluh miliar empat ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah koma nol nol).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

#### Pasal 17

- (1) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), termasuk belanja keperluan mendesak.
- (2) Belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

#### Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 19

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal **18 Desember 2020**

  
BUPATI BANDUNG,  
  
DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal **18 Desember 2020**

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,  
  
WISNA UMARAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR **10**  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA  
BARAT : **(10/192/2020)**

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>969.634.012.302</b>
4.1.01	Pajak Daerah	493.013.669.290
4.1.02	Retribusi Daerah	21.972.392.911
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	68.441.288.786
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	386.206.661.315
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.159.812.807.049</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.639.308.213.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	520.504.594.049
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>28.000.000.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	28.000.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>4.157.446.819.351</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.453.425.102.255</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.087.337.448.977
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.135.206.285.484
5.1.04	Belanja Subsidi	1.483.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	206.030.208.138
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.368.159.656
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>480.053.680.303</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	22.313.404.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.919.404.971
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.259.257.551
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	269.931.181.131
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.519.480.750
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>53.913.774.271</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	53.913.774.271
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>640.490.457.820</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	42.298.606.220
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	598.191.851.600
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.627.883.014.649</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(470.436.195.298)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>493.937.275.297</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	493.937.275.297
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>493.937.275.297</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>23.501.080.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	23.501.080.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>23.501.080.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>470.436.195.297</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>(0)</b>

Bupati Kabupaten Bandung  
  
 Dadang M. Naser

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>377.409.764.980</b>	<b>2.351.187.344.305</b>	<b>411.763.204.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.762.950.548.878</b>
<b>1 01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>0</b>	<b>1.153.967.618.530</b>	<b>53.901.660.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.207.869.278.597</b>
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	0	1.153.967.618.530	53.901.660.067	0	0	1.207.869.278.597
<b>1 02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>370.027.669.980</b>	<b>803.894.560.037</b>	<b>56.227.066.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.121.626.685</b>
1 02	1.02.0.00.0.00.02.00 DINAS KESEHATAN	370.027.669.980	803.894.560.037	56.227.066.648	0	0	860.121.626.685
<b>1 03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>6.613.555.000</b>	<b>191.414.604.877</b>	<b>292.014.402.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483.429.007.253</b>
1 03	1.03.2.15.1.04.3.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	6.613.555.000	128.733.147.642	292.014.402.376	0	0	420.747.550.018
1 03	1.04.2.10.1.03.4.00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0	62.681.457.235	0	0	0	62.681.457.235
<b>1 04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>768.540.000</b>	<b>73.486.630.483</b>	<b>4.396.157.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.882.788.153</b>
1 04	1.04.2.10.1.03.4.00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	768.540.000	73.486.630.483	4.396.157.670	0	0	77.882.788.153
<b>1 05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>0</b>	<b>87.616.984.046</b>	<b>4.496.525.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.113.509.742</b>
1 05	1.05.0.00.0.00.5.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	47.846.950.048	2.034.610.996	0	0	49.881.561.044
1 05	1.05.0.00.0.00.6.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	23.542.591.717	1.456.034.700	0	0	24.998.626.417
1 05	1.05.0.00.0.00.7.00 DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0	16.227.442.281	1.005.880.000	0	0	17.233.322.281
<b>1 06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>0</b>	<b>40.806.946.332</b>	<b>727.392.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.534.338.448</b>
1 06	1.06.0.00.0.00.8.00 DINAS SOSIAL	0	40.806.946.332	727.392.116	0	0	41.534.338.448
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>12.747.541.040</b>	<b>390.452.134.924</b>	<b>43.410.766.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.862.901.618</b>
<b>2 07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>0</b>	<b>36.013.798.812</b>	<b>683.939.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.697.738.512</b>
2 07	2.07.3.32.0.00.9.00 DINAS KETENAGAKERJAAN	0	36.013.798.812	683.939.700	0	0	36.697.738.512
<b>2 08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>0</b>	<b>1.889.154.114</b>	<b>37.808.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.926.962.864</b>

2	08	2.14.2.08.0.00.14.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	1.889.154.114	37.808.750	0	0	1.926.962.864
<b>2</b>	<b>09</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>67.371.850</b>	<b>18.244.168.362</b>	<b>344.054.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.588.222.562</b>
2	09	2.09.3.25.0.00.10.0000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	67.371.850	18.244.168.362	344.054.200	0	0	18.588.222.562
<b>2</b>	<b>10</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>0</b>	<b>4.145.061.997</b>	<b>4.787.548.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.932.610.496</b>
2	10	1.04.2.10.1.03.4.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0	4.145.061.997	4.787.548.499	0	0	8.932.610.496
<b>2</b>	<b>11</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>4.990.000.000</b>	<b>66.866.324.616</b>	<b>306.358.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.172.683.265</b>
2	11	2.11.0.00.0.00.11.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.990.000.000	66.866.324.616	306.358.649	0	0	67.172.683.265
<b>2</b>	<b>12</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>0</b>	<b>21.879.743.212</b>	<b>1.156.834.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.036.577.712</b>
2	12	2.12.0.00.0.00.12.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	21.879.743.212	1.156.834.500	0	0	23.036.577.712
<b>2</b>	<b>13</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>0</b>	<b>25.740.705.158</b>	<b>82.184.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.822.889.854</b>
2	13	2.13.0.00.0.00.13.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	25.740.705.158	82.184.696	0	0	25.822.889.854
<b>2</b>	<b>14</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>0</b>	<b>29.967.594.681</b>	<b>635.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.603.114.681</b>
2	14	2.14.2.08.0.00.14.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	29.967.594.681	635.520.000	0	0	30.603.114.681
<b>2</b>	<b>15</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>6.367.990.000</b>	<b>49.064.210.668</b>	<b>20.792.840.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.857.051.603</b>
2	15	1.03.2.15.1.04.3.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	0	5.338.411.035	18.350.983.085	0	0	23.689.394.120
2	15	2.15.0.00.0.00.15.00	DINAS PERHUBUNGAN	6.367.990.000	43.725.799.633	2.441.857.850	0	0	46.167.657.483
<b>2</b>	<b>16</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>0</b>	<b>19.761.248.812</b>	<b>525.720.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.286.969.137</b>
2	16	2.16.2.20.2.21.16.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0	19.761.248.812	525.720.325	0	0	20.286.969.137
<b>2</b>	<b>17</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>0</b>	<b>15.476.601.512</b>	<b>290.466.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.767.067.512</b>
2	17	2.17.0.00.0.00.17.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	0	15.476.601.512	290.466.000	0	0	15.767.067.512
<b>2</b>	<b>18</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>0</b>	<b>18.868.098.905</b>	<b>301.268.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.169.366.905</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.18.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	18.868.098.905	301.268.000	0	0	19.169.366.905
<b>2</b>	<b>19</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<b>802.179.190</b>	<b>55.701.194.921</b>	<b>13.070.729.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.771.924.861</b>
2	19	2.19.0.00.0.00.19.00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	802.179.190	55.701.194.921	13.070.729.940	0	0	68.771.924.861
<b>2</b>	<b>20</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>0</b>	<b>2.940.238.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.940.238.100</b>
2	20	2.16.2.20.2.21.16.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0	2.940.238.100	0	0	0	2.940.238.100
<b>2</b>	<b>21</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>0</b>	<b>870.896.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.896.397</b>
2	21	2.16.2.20.2.21.16.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0	870.896.397	0	0	0	870.896.397
<b>2</b>	<b>22</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>520.000.000</b>	<b>10.950.312.500</b>	<b>234.687.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.185.000.000</b>
2	22	2.22.3.26.0.00.20.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	520.000.000	10.950.312.500	234.687.500	0	0	11.185.000.000

<b>2</b>	<b>23</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>0</b>	<b>11.672.482.148</b>	<b>160.805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.833.287.148</b>
2	23	2.23.2.24.0.00.21.00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0	11.672.482.148	160.805.000	0	0	11.833.287.148
<b>2</b>	<b>24</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>0</b>	<b>400.300.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.300.009</b>
2	24	2.23.2.24.0.00.21.00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0	400.300.009	0	0	0	400.300.009
<b>3</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>2.376.969.334</b>	<b>146.866.525.051</b>	<b>10.638.242.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.504.767.662</b>
<b>3</b>	<b>25</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>0</b>	<b>6.724.362.870</b>	<b>185.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.909.687.870</b>
3	25	2.09.3.25.0.00.10.0000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	0	6.724.362.870	185.325.000	0	0	6.909.687.870
<b>3</b>	<b>26</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>0</b>	<b>26.557.327.391</b>	<b>7.089.847.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.647.175.287</b>
3	26	2.22.3.26.0.00.20.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0	26.557.327.391	7.089.847.896	0	0	33.647.175.287
<b>3</b>	<b>27</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>559.629.784</b>	<b>64.523.683.932</b>	<b>1.725.777.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.249.461.406</b>
3	27	3.27.0.00.0.00.22.00	DINAS PERTANIAN	559.629.784	64.523.683.932	1.725.777.474	0	0	66.249.461.406
<b>3</b>	<b>29</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>0</b>	<b>537.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537.800.000</b>
3	29	3.30.3.31.3.29.23.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	537.800.000	0	0	0	537.800.000
<b>3</b>	<b>30</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>1.817.339.550</b>	<b>8.965.740.528</b>	<b>1.557.292.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.523.032.769</b>
3	30	3.30.3.31.3.29.23.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.817.339.550	8.965.740.528	1.557.292.241	0	0	10.523.032.769
<b>3</b>	<b>31</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>0</b>	<b>39.557.610.330</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.637.610.330</b>
3	31	3.30.3.31.3.29.23.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	39.557.610.330	80.000.000	0	0	39.637.610.330
<b>4</b>			<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>0</b>	<b>190.278.782.568</b>	<b>4.822.366.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.101.149.158</b>
<b>4</b>	<b>01</b>		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>0</b>	<b>102.111.545.771</b>	<b>4.282.119.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.393.665.761</b>
4	01	1.04.2.10.1.03.4.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0	0	0	0	0	0
4	01	2.13.0.00.0.00.13.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0	0
4	01	2.17.0.00.0.00.17.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	0	0	0	0	0	0
4	01	3.30.3.31.3.29.23.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0
4	01	4.01.0.00.0.00.24.0000	SEKRETARIAT DAERAH	0	102.111.545.771	4.282.119.990	0	0	106.393.665.761
4	01	5.02.0.00.0.00.27.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	0	0	0
4	01	5.02.0.00.0.00.28.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>02</b>		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>0</b>	<b>88.167.236.797</b>	<b>540.246.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.707.483.397</b>
4	02	4.02.0.00.0.00.25.00	SEKRETARIAT DPRD	0	88.167.236.797	540.246.600	0	0	88.707.483.397
<b>5</b>			<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>3.764.267.765.125</b>	<b>158.753.111.696</b>	<b>4.226.732.312</b>	<b>53.913.774.271</b>	<b>640.490.457.820</b>	<b>857.384.076.099</b>
<b>5</b>	<b>01</b>		<b>PERENCANAAN</b>	<b>0</b>	<b>20.670.664.529</b>	<b>1.352.072.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.022.737.409</b>
5	01	5.01.5.05.0.00.26.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	20.670.664.529	1.352.072.880	0	0	22.022.737.409
<b>5</b>	<b>02</b>		<b>KEUANGAN</b>	<b>3.764.267.765.125</b>	<b>101.047.270.674</b>	<b>2.297.414.710</b>	<b>53.913.774.271</b>	<b>640.490.457.820</b>	<b>797.748.917.475</b>
5	02	5.02.0.00.0.00.27.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.429.167.892.786	32.593.608.764	1.585.853.210	53.913.774.271	640.490.457.820	728.583.694.065

5	02	5.02.0.00.0.00.28.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.335.099.872.339	68.453.661.910	711.561.500	0	0	69.165.223.410
<b>5</b>	<b>03</b>		<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>0</b>	<b>29.794.277.703</b>	<b>577.244.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.371.522.425</b>
5	03	5.03.5.04.0.00.29.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	29.794.277.703	577.244.722	0	0	30.371.522.425
<b>5</b>	<b>04</b>		<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>0</b>	<b>6.114.898.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.114.898.790</b>
5	04	5.03.5.04.0.00.29.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	6.114.898.790	0	0	0	6.114.898.790
<b>5</b>	<b>05</b>		<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>0</b>	<b>1.126.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.126.000.000</b>
5	05	5.01.5.05.0.00.26.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	1.126.000.000	0	0	0	1.126.000.000
<b>6</b>			<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>0</b>	<b>23.429.461.741</b>	<b>179.560.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.609.022.241</b>
<b>6</b>	<b>01</b>		<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>0</b>	<b>23.429.461.741</b>	<b>179.560.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.609.022.241</b>
6	01	6.01.0.00.0.00.30.0000	INSPEKTORAT DAERAH	0	23.429.461.741	179.560.500	0	0	23.609.022.241
<b>7</b>			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>644.778.872</b>	<b>176.649.444.333</b>	<b>4.929.007.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.578.451.356</b>
<b>7</b>	<b>01</b>		<b>KECAMATAN</b>	<b>644.778.872</b>	<b>176.649.444.333</b>	<b>4.929.007.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.578.451.356</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	KECAMATAN CILEUNYI	59.255.000	4.818.808.995	47.086.000	0	0	4.865.894.995
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	KECAMATAN CILENGKRANG	12.225.000	5.081.681.446	4.500.000	0	0	5.086.181.446
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	KECAMATAN CIMENYAN	26.500.001	9.738.698.400	212.169.700	0	0	9.950.868.100
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	KECAMATAN BOJONGSOANG	32.500.000	4.827.160.933	72.240.225	0	0	4.899.401.158
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	KECAMATAN MARGAHAYU	52.925.000	7.238.522.185	242.909.076	0	0	7.481.431.261
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN MARGAASIH	39.000.000	4.806.866.098	30.934.000	0	0	4.837.800.098
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	KECAMATAN DAYEUKHKOLOT	22.420.000	8.696.576.091	989.302.750	0	0	9.685.878.841
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	KECAMATAN KATAPANG	12.739.000	4.907.990.317	242.761.915	0	0	5.150.752.232
7	01	7.01.0.00.0.00.09.00	KECAMATAN PAMEUNGPEUK	5.110.000	4.652.432.721	66.195.000	0	0	4.718.627.721
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	KECAMATAN ARJASARI	11.745.000	4.716.698.126	8.400.000	0	0	4.725.098.126
7	01	7.01.0.00.0.00.11.00	KECAMATAN PANGALENGAN	5.200.000	4.740.973.177	66.007.300	0	0	4.806.980.477
7	01	7.01.0.00.0.00.12.00	KECAMATAN CIMAUNG	13.865.000	4.728.565.226	0	0	0	4.728.565.226
7	01	7.01.0.00.0.00.13.00	KECAMATAN BANJARAN	13.359.950	4.434.112.607	88.830.220	0	0	4.522.942.827
7	01	7.01.0.00.0.00.14.00	KECAMATAN CICALENGKA	20.150.000	4.959.697.039	29.490.600	0	0	4.989.187.639
7	01	7.01.0.00.0.00.15.00	KECAMATAN RANCAEKEK	63.472.500	8.018.708.329	170.955.300	0	0	8.189.663.629
7	01	7.01.0.00.0.00.16.00	KECAMATAN CIKANCUNG	11.875.000	4.770.767.966	162.813.600	0	0	4.933.581.566
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN NAGREG	18.220.000	5.184.558.682	50.283.300	0	0	5.234.841.982
7	01	7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN BALEENDAH	33.800.000	17.255.011.298	654.889.800	0	0	17.909.901.098
7	01	7.01.0.00.0.00.19.00	KECAMATAN PACET	9.350.000	4.707.310.889	98.396.350	0	0	4.805.707.239
7	01	7.01.0.00.0.00.20.00	KECAMATAN KERTASARI	3.900.000	4.285.898.513	192.130.000	0	0	4.478.028.513
7	01	7.01.0.00.0.00.21.00	KECAMATAN CIPARAY	29.300.000	4.500.075.647	202.532.900	0	0	4.702.608.547
7	01	7.01.0.00.0.00.22.00	KECAMATAN MAJALAYA	13.000.000	4.778.025.883	54.131.725	0	0	4.832.157.608

## Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD

7	01	7.01.0.00.0.00.15.00	KECAMATAN RANCAEKEK	63.472.500	8.018.708.329	170.955.300	0	0	8.189.663.629
7	01	7.01.0.00.0.00.16.00	KECAMATAN CIKANCUNG	11.875.000	4.770.767.966	162.813.600	0	0	4.933.581.566
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN NAGREG	18.220.000	5.184.558.682	50.283.300	0	0	5.234.841.982
7	01	7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN BALEENDAH	33.800.000	17.255.011.298	654.889.800	0	0	17.909.901.098
7	01	7.01.0.00.0.00.19.00	KECAMATAN PACET	9.350.000	4.707.310.889	98.396.350	0	0	4.805.707.239
7	01	7.01.0.00.0.00.20.00	KECAMATAN KERTASARI	3.900.000	4.285.898.513	192.130.000	0	0	4.478.028.513
7	01	7.01.0.00.0.00.21.00	KECAMATAN CIPARAY	29.300.000	4.500.075.647	202.532.900	0	0	4.702.608.547
7	01	7.01.0.00.0.00.22.00	KECAMATAN MAJALAYA	13.000.000	4.778.025.883	54.131.725	0	0	4.832.157.608
7	01	7.01.0.00.0.00.23.00	KECAMATAN IBUN	7.150.084	5.210.565.685	138.476.000	0	0	5.349.041.685
7	01	7.01.0.00.0.00.24.00	KECAMATAN PASEH	9.750.000	5.131.339.549	57.556.073	0	0	5.188.895.622
7	01	7.01.0.00.0.00.25.00	KECAMATAN SOLOKAN JERUK	11.250.000	4.915.659.006	106.445.453	0	0	5.022.104.459
7	01	7.01.0.00.0.00.26.00	KECAMATAN PASIRJAMBU	11.500.000	4.910.432.292	57.706.936	0	0	4.968.139.228
7	01	7.01.0.00.0.00.27.00	KECAMATAN CIWIDEY	24.227.500	4.708.295.114	64.527.000	0	0	4.772.822.114
7	01	7.01.0.00.0.00.28.00	KECAMATAN RANCABALI	14.175.000	4.991.132.957	253.545.500	0	0	5.244.678.457
7	01	7.01.0.00.0.00.29.0000	KECAMATAN SOREANG	26.000.000	5.605.467.440	452.164.300	0	0	6.057.631.740
7	01	7.01.0.00.0.00.30.00	KECAMATAN CANGKUANG	13.150.000	4.649.134.531	19.000.000	0	0	4.668.134.531
7	01	7.01.0.00.0.00.31.00	KECAMATAN KUTAWARINGIN	17.664.837	4.678.277.191	92.626.000	0	0	4.770.903.191
8			<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>0</b>	<b>15.808.297.637</b>	<b>83.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.892.097.637</b>
8	01		<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>0</b>	<b>15.808.297.637</b>	<b>83.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.892.097.637</b>
8	01	8.01.0.00.0.00.31.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	15.808.297.637	83.800.000	0	0	15.892.097.637
<b>TOTAL</b>				<b>4.157.446.819.351</b>	<b>3.453.425.102.255</b>	<b>480.053.680.303</b>	<b>53.913.774.271</b>	<b>640.490.457.820</b>	<b>4.627.883.014.649</b>

Bupati Kabupaten Bandung



**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
<b>Jumlah Pendapatan</b>											<b>0</b>	
0	00	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				<b>BELANJA</b>		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>1.207.869.278.597</b>	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>115.207.433.563</b>	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00					<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>40.380.761.396</b>	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02					Penambahan Ruang Kelas Baru	12.945.441.440	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	581.438.844	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	581.438.844	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2			BELANJA MODAL	12.364.002.596	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.364.002.596	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	678.244.920	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	43.068.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	43.068.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2			BELANJA MODAL	635.176.920	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.814.425	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	568.362.495	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.136.679.683	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	71.000.004	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	71.000.004	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	2			BELANJA MODAL	1.065.679.679	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.065.679.679	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.844.047.963	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	723.547.987	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	723.547.987	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	2			BELANJA MODAL	7.120.499.976	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.120.499.976	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	5.841.911.338		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	283.751.471		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	283.751.471	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	2	BELANJA MODAL	5.558.159.867		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.558.159.867	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	392.491.097		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	51.473.600		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.473.600	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	2	BELANJA MODAL	341.017.497		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	341.017.497	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.007.781.780		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	1	BELANJA OPERASI	120.127.796		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	120.127.796	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	2	BELANJA MODAL	887.653.984		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.640.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	884.013.984	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	403.343.075		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	5	1	BELANJA OPERASI	60.528.938		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.528.938	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	5	2	BELANJA MODAL	342.814.137		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	342.814.137	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14			Pengadaan Mebel Sekolah	4.786.803.400		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1	BELANJA OPERASI	61.103.400		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	61.103.400	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2	BELANJA MODAL	4.725.700.000		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.725.700.000	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	440.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	1			BELANJA OPERASI	17.344.200	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	17.344.200	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	2			BELANJA MODAL	422.655.800	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	422.655.800	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17					Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.654.016.700	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	1			BELANJA OPERASI	389.556.700	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	389.556.700	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	2			BELANJA MODAL	2.264.460.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.264.460.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	23					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	800.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	1			BELANJA OPERASI	800.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	800.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	24					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	150.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	24	5	1			BELANJA OPERASI	150.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	24	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	25					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	25	5	1			BELANJA OPERASI	500.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	25	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	28					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	600.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1			BELANJA OPERASI	600.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	280.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1	05		Belanja Hibah	320.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	200.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1			BELANJA OPERASI	200.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>29.254.343.368</b>	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	6.770.100.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5 2	BELANJA MODAL	6.770.100.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5 2 01	Belanja Modal Tanah	6.770.100.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02		Penambahan Ruang Kelas Baru	5.084.970.082	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5 1	BELANJA OPERASI	2.798.949.051	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	305.107.926	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5 1 05	Belanja Hibah	2.493.841.125	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5 2	BELANJA MODAL	2.286.021.031	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.286.021.031	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10		Pembangunan Fasilitas Parkir	2.846.920.782	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5 1	BELANJA OPERASI	789.700.902	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.071.852	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5 1 05	Belanja Hibah	719.629.050	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5 2	BELANJA MODAL	2.057.219.880	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.057.219.880	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.341.234.860	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5 1	BELANJA OPERASI	505.651.587	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	284.648.091	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5 1 05	Belanja Hibah	221.003.496	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5 2	BELANJA MODAL	1.835.583.273	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.835.583.273	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.173.918.860	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	5 1	BELANJA OPERASI	1.199.309.433	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.453.931	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	5 1 05	Belanja Hibah	1.151.855.502	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	2	BELANJA MODAL	1.974.609.427		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.974.609.427	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25				Pengadaan Mebel Sekolah	4.030.900.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1		BELANJA OPERASI	1.366.700.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.900.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1	05	Belanja Hibah	1.314.800.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	2		BELANJA MODAL	2.664.200.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.664.200.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	32				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.170.600.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	32	5	1		BELANJA OPERASI	1.170.600.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	32	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	120.600.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	32	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	1.050.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	950.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1		BELANJA OPERASI	950.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	950.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	662.182.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1		BELANJA OPERASI	662.182.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	662.182.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.045.218.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38	5	1		BELANJA OPERASI	1.045.218.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	545.218.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38	5	1	05	Belanja Hibah	500.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	40				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	378.298.784	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	1		BELANJA OPERASI	378.298.784	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	378.298.784	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	41					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	600.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	1			BELANJA OPERASI	600.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	337.818.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	1	05		Belanja Hibah	262.182.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1			BELANJA OPERASI	200.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>					<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>15.443.888.159</b>	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01					Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.379.947.588	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.379.947.588	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	56.056.620	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	05		Belanja Hibah	1.323.890.968	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07					Pengadaan Mebel PAUD	3.317.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	5	1			BELANJA OPERASI	3.317.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	67.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	5	1	05		Belanja Hibah	3.250.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09					Pengadaan Perlengkapan PAUD	1.787.500.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	5	1			BELANJA OPERASI	1.787.500.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	47.500.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	5	1	05		Belanja Hibah	1.740.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10					Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	905.398.890	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10	5	1			BELANJA OPERASI	905.398.890	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	210.587.890	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10	5	1	05		Belanja Hibah	694.811.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	2.354.439.725	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12	5	1			BELANJA OPERASI	2.354.439.725	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	44.439.725	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12	5	1	05		Belanja Hibah	2.310.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	13					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	250.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	13	5	1			BELANJA OPERASI	250.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	13	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	16					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	239.735.519	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1			BELANJA OPERASI	239.735.519	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	239.735.519	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	17					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	534.466.437	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	17	5	1			BELANJA OPERASI	534.466.437	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	17	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	534.466.437	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	18					Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.675.400.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1			BELANJA OPERASI	4.675.400.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	380.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1	05		Belanja Hibah	4.295.400.000	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>	<b>00</b>					<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>30.128.440.640</b>	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01					Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	770.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1			BELANJA OPERASI	770.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	113.185.877	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1	05		Belanja Hibah	656.814.123	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.800.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1			BELANJA OPERASI	3.800.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.597.600	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1	05		Belanja Hibah	3.793.402.400	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	09					Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.025.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	09	5	1			BELANJA OPERASI	7.025.000.000	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	471.182.650	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	09	5	1	05		Belanja Hibah	6.553.817.350	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	10					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	2.164.200.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	10	5	1			BELANJA OPERASI	2.164.200.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	424.200.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	10	5	1	05		Belanja Hibah	1.740.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	12					Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	5.987.537.750	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	12	5	1			BELANJA OPERASI	5.987.537.750	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	12	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.987.537.750	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	13					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	650.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	13	5	1			BELANJA OPERASI	650.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	13	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	650.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	15					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	263.153.600	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	15	5	1			BELANJA OPERASI	263.153.600	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	15	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	263.153.600	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	16					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7.712.646.400	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	16	5	1			BELANJA OPERASI	7.712.646.400	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	16	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.782.646.400	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	16	5	1	05		Belanja Hibah	3.930.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	17					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.755.902.890	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1			BELANJA OPERASI	1.755.902.890	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	64.402.890	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1	05		Belanja Hibah	1.691.500.000	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>1.050.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>					<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>600.000.000</b>	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	600.000.000	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	600.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	<b>450.000.000</b>	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	450.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	450.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>40.771.262.384</b>	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>40.771.262.384</b>	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	39.512.470.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	39.512.470.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.263.200.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1 05	Belanja Hibah	249.270.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.258.792.384	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.258.792.384	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.258.792.384	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>06</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>	<b>450.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>450.000.000</b>	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03			Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	200.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	07			Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	250.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.050.390.582.650</b>	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>780.000.000</b>	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	200.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	70.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	70.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	70.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	70.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	70.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5 1	BELANJA OPERASI	70.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	70.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	5 1	BELANJA OPERASI	70.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	150.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5 1	BELANJA OPERASI	150.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.045.493.176.910</b>	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.045.413.176.910	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	1.045.413.176.910	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	1.045.413.176.910	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	80.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1			BELANJA OPERASI	51.632.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	51.632.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	2			BELANJA MODAL	28.368.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.368.000	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>					<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>250.000.000</b>	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	250.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1			BELANJA OPERASI	250.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>00</b>					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>300.000.000</b>	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	5	1			BELANJA OPERASI	300.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.446.070.398</b>	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	20.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	517.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	251.150.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	251.150.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2			BELANJA MODAL	265.850.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	265.850.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	151.070.398	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	106.070.398	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	106.070.398	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	2			BELANJA MODAL	45.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	75.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07					Penyediaan Bahan/Material	30.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1			BELANJA OPERASI	30.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08					Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1			BELANJA OPERASI	100.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	553.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	553.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	553.000.000	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.680.378.000</b>	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	200.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.480.378.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	1.480.378.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.480.378.000	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>440.957.342</b>	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	175.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	175.000.000	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	265.957.342	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	19.069.342	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	19.069.342	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2			BELANJA MODAL	246.888.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	246.888.000	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>1.207.869.278.597</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(1.207.869.278.597)</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>	

Bupati Kabupaten Bandung

Dadang M. Naser

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>				<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>4</b>	<b>1</b>			<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>370.027.669.980</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	251.420.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	369.776.249.980	
<b>Jumlah Pendapatan</b>											<b>370.027.669.980</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>				<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>860.121.626.685</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>129.394.827.430</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>					<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>24.983.269.594</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	01					Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1.175.205.352	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	01	5	2			BELANJA MODAL	1.175.205.352	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	01	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.175.205.352	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	03					Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.910.300.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	80.740.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	80.740.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	03	5	2			BELANJA MODAL	2.829.560.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	03	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.829.560.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	12					Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	237.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	12	5	2			BELANJA MODAL	237.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	12	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	237.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	13					Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.450.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	13	5	1			BELANJA OPERASI	3.888.750	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	13	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.888.750	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	13	5	2			BELANJA MODAL	1.446.111.250	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	13	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	596.111.250	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	13	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	850.000.000	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	14					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.370.028.823	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	14	5	2			BELANJA MODAL	10.370.028.823	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	14	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.370.028.823	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	16					Pengadaan Obat, Vaksin	1.818.859.237	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	16	5	1			BELANJA OPERASI	1.813.859.237	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	16	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.813.859.237	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	16	5	2			BELANJA MODAL	5.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	16	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	17					Pengadaan Bahan Habis Pakai	7.021.276.182	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	17	5	1			BELANJA OPERASI	7.021.276.182	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	17	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	7.021.276.182	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>					<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>68.010.044.391</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	01					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	155.742.875	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	155.742.875	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	155.742.875	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	02					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	03					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	04					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	04	5	1			BELANJA OPERASI	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	05					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	05	5	1			BELANJA OPERASI	150.000.000	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	315.698.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	06	5	1			BELANJA OPERASI	315.698.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	315.698.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	07	5	1			BELANJA OPERASI	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	08					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	115.466.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	08	5	1			BELANJA OPERASI	115.466.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	115.466.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	09					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	124.171.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	09	5	1			BELANJA OPERASI	124.171.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	124.171.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	10					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	168.805.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	10	5	1			BELANJA OPERASI	168.805.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	168.805.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	241.950.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	11	5	1			BELANJA OPERASI	241.950.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	241.950.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	410.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	12	5	1			BELANJA OPERASI	410.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	12	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	210.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	12	5	1	05		Belanja Hibah	200.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	13					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	72.070.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	13	5	1			BELANJA OPERASI	72.070.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	13	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	72.070.000	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	14		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	140.790.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	14	5 1	BELANJA OPERASI	140.790.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	14	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	140.790.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	889.476.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	15	5 1	BELANJA OPERASI	889.476.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	15	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	889.476.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	108.942.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	16	5 1	BELANJA OPERASI	108.942.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	16	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	108.942.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	260.170.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	17	5 1	BELANJA OPERASI	260.170.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	17	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	260.170.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	245.621.250	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	19	5 1	BELANJA OPERASI	245.621.250	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	19	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	245.621.250	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	20	5 1	BELANJA OPERASI	100.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	20	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	23		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	803.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	23	5 1	BELANJA OPERASI	803.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	23	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	23	5 1 05	Belanja Hibah	693.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	24		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	10.000.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	24	5 1	BELANJA OPERASI	3.775.165.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	24	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.775.165.000	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	24	5	2	BELANJA MODAL	6.224.835.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	24	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.224.835.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	25			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	270.635.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	25	5	1	BELANJA OPERASI	270.635.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	25	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	270.635.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	26			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	45.952.166.798		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	26	5	1	BELANJA OPERASI	45.952.166.798		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	26	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.952.166.798	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	28			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	67.500.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	28	5	1	BELANJA OPERASI	67.500.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	28	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	29			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	407.451.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	29	5	1	BELANJA OPERASI	407.451.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	29	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	29	5	1	05	Belanja Hibah	307.451.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	33			Operasional Pelayanan Puskesmas	5.121.601.768		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	33	5	1	BELANJA OPERASI	2.249.527.782		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	33	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.249.527.782	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	33	5	2	BELANJA MODAL	2.872.073.986		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	33	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.872.073.986	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	34			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	200.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	34	5	1	BELANJA OPERASI	200.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	34	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	35			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	100.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	35	5	1	BELANJA OPERASI	100.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	35	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	310.737.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	36	5 1	BELANJA OPERASI	310.737.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	36	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	310.737.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	37		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	676.949.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	37	5 1	BELANJA OPERASI	676.949.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	37	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	676.949.200	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>332.017.750</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.03	02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	332.017.750	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.03	02	5 1	BELANJA OPERASI	332.017.750	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.03	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	332.017.750	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>	<b>00</b>		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>36.069.495.695</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.04	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	100.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.04	01	5 1	BELANJA OPERASI	100.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.04	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.04	02		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.04	02	5 1	BELANJA OPERASI	100.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.04	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.04	03		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	35.860.648.195	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.04	03	5 1	BELANJA OPERASI	35.860.648.195	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.04	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.860.648.195	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.04	04		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	8.847.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.04	04	5 1	BELANJA OPERASI	8.847.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.04	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.847.500	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>8.781.084.620</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>716.999.879</b>	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	03	2.01	02		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	716.999.879	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	03	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	716.999.879	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	03	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	716.999.879	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.914.859.741</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	03	2.02	02		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	7.914.859.741	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	03	2.02	02	5 1	BELANJA OPERASI	7.914.859.741	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	03	2.02	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.914.859.741	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>		<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>149.225.000</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	03	2.03	01		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	149.225.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	03	2.03	01	5 1	BELANJA OPERASI	149.225.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	03	2.03	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	149.225.000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>04</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>290.258.471</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>147.250.000</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	04	2.01	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	147.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	04	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	147.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	04	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	147.250.000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>04</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>		<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>143.008.471</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	04	2.03	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	143.008.471	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	04	2.03	01	5 1	BELANJA OPERASI	143.008.471	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	04	2.03	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	143.008.471	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening						Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>05</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>451.020.854</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>311.828.854</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	311.828.854	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	05	2.01	01 5 1	BELANJA OPERASI	311.828.854	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	05	2.01	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	311.828.854	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>05</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>139.192.000</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	139.192.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	05	2.02	01 5 1	BELANJA OPERASI	139.192.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	05	2.02	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	139.192.000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>721.204.435.310</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>350.789.500</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	211.010.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.01	01 5 1	BELANJA OPERASI	211.010.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.01	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	211.010.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.01	02 5 1	BELANJA OPERASI	20.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.01	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.01	03 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.01	03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.01	04 5 1	BELANJA OPERASI	12.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.01	04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.01	05 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.279.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	82.279.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	82.279.500	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>279.657.752.464</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	279.324.465.641	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	279.324.465.641	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	279.324.465.641	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	280.750.823	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	280.750.823	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	280.750.823	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.890.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	21.890.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.890.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.228.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	14.228.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.228.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.02	08				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	16.417.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.02	08	5	1		BELANJA OPERASI	16.417.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.417.500	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>448.081.066</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.05	02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	75.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.05	03				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.05	03	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	

**KABUPATEN BANDUNG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.05	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.05	09					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	343.081.066	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.05	09	5	1			BELANJA OPERASI	343.081.066	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.05	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	343.081.066	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.644.253.307</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	685.448.380	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	187.601.820	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	187.601.820	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	02	5	2			BELANJA MODAL	497.846.560	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	497.846.560	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	94.737.690	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	94.737.690	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	94.737.690	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	30.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	400.053.909	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	400.053.909	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	400.053.909	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.512.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	06	5	1			BELANJA OPERASI	17.512.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	17.512.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	08					Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.797.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	08	5	1			BELANJA OPERASI	29.797.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	29.797.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	386.704.328	

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































